



Kementerian PPN/
Bappenas

Resiliensi OMS di Tengah Penyempitan Ruang Sipil

Disampaikan dalam Kegiatan Diseminasi Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023

Maharani
Perencana Ahli Madya
Jakarta, 5 Agustus 2024

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI



Kerangka Paparan



PENYEMPITAN RUANG SIPIL

**ARAH KEBIJAKAN TERKAIT MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

CATATAN PENUTUP



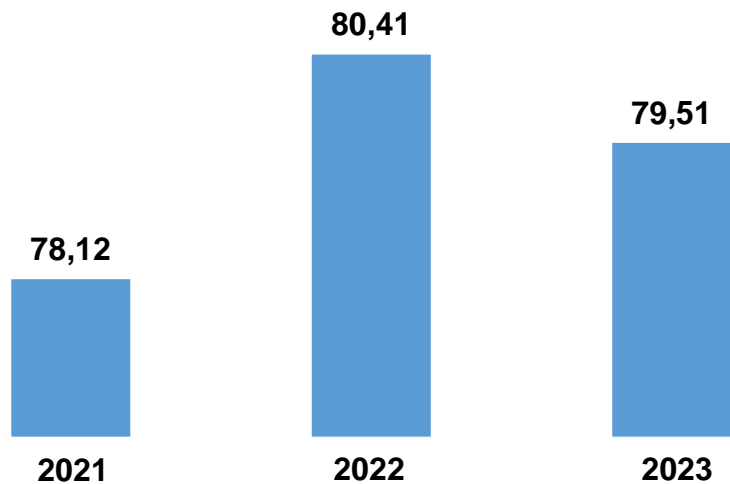
PENYEMPITAN RUANG SIPIL



Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023....(1)

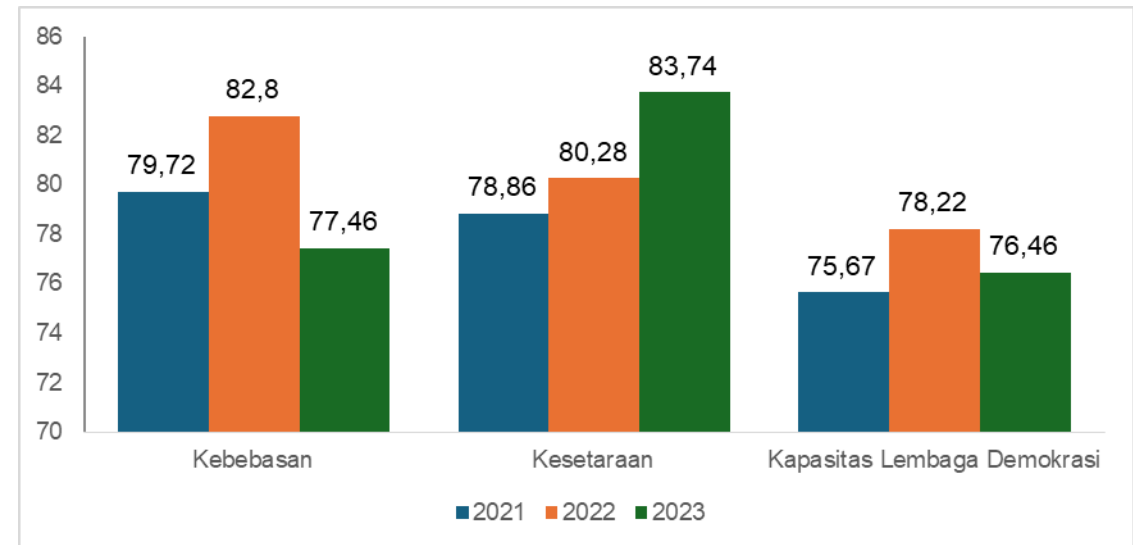
Penyempitan ruang sipil tergambar dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023. **IDI nasional 2023 turun 0,9 poin** dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dari 80,41 menjadi 79,51. Pada IDI nasional 2023, **Aspek Kebebasan** mengalami **penurunan terbesar** dibanding kedua aspek lainnya (Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi), sedangkan **Aspek Kesetaraan** merupakan **satu-satunya** aspek yang mengalami **kenaikan**.

IDI 2021-2023



Sumber: BPS, 2024

Aspek IDI Nasional 2023



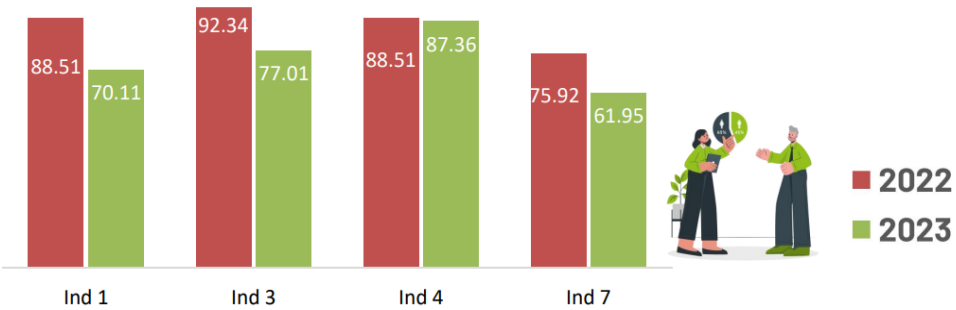
Sumber: BPS, 2024



Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023....(2)

Indikator Aspek Kebebasan pada IDI Pusat

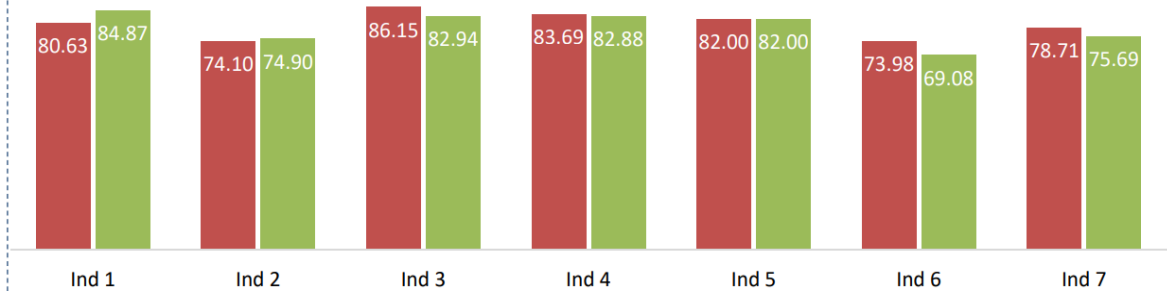
Aspek dengan capaian terendah pada IDI Pusat



Indikator	
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
4	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Semua indikator pada aspek kebebasan tingkat pusat mengalami penurunan

Indikator Aspek Kebebasan pada IDI Provinsi



Indikator	
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
4	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat
6	Pemenuhan hak-hak pekerja
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya



Kebebasan Sipil dalam Freedom in The World 2024

Merujuk pada beberapa data yang dikeluarkan oleh lembaga riset terkait demokrasi, Indonesia mengalami sedikit pelambatan kinerja demokrasi. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

FREEDOM IN THE WORLD 2024

Indonesia

PARTLY FREE

57

/100

<u>Political Rights</u>	29 /40
<u>Civil Liberties</u>	28 /60

LAST YEAR'S SCORE & STATUS

58 /100 ● Partly Free

Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.

Berdasarkan bagan di samping, dapat disimpulkan bahwa kinerja demokrasi di Indonesia **cukup baik**. Akan tetapi, masih ditemukan **tantangan-tantangan yang signifikan** seperti korupsi sistemik, **diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas**, konflik di Papua, serta **penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama yang dipolitisasi**.

Sumber: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024>



ARAH KEBIJAKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



17 Arah (Tujuan) Pembangunan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan



Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Juli 2024)

IE9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tantangan

Permasalahan yang dihadapi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran dan fungsi dalam rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyaluran aspirasi masyarakat, antara lain kaderisasi dan pendanaan negara yang belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kemandirian dan modernisasi partai politik.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

Sasaran

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Arah Kebijakan (Terkait Politik)

- Penguatan tata kelola partai politik melalui penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan yang memadai.
- Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat sipil melalui penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil.



Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Juli 2024)

IE10: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Tantangan

Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers; **serta kurangnya kebebasan sipil**, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. **Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.**

Sasaran

Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak.

Arah Kebijakan

- Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi UU Partai Politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta media dan pers yang berkualitas;
- Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
- Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas;
- Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat;
- **Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.**



Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Agenda Pembangunan: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Tantangan

Dalam bidang demokrasi, **belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil**, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi.

Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.

Arah Kebijakan

1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional; transformasi kelembagaan demokrasi; internalisasi Ideologi Pancasila dan Konstitusi; transformasi kelembagaan dan tata kelola keamanan laut berdasarkan regulasi tunggal; serta transformasi kelembagaan dan tata kelola keamanan siber.
2. **Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan** melalui **penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat**; serta **penguatan kesetaraan masyarakat pada sektor politik, sosial, dan ekonomi**.
3. **Komunikasi Publik** melalui **penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik**; dan pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri.



Prioritas Nasional RKP 2025

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Intervensi Kebijakan

Prioritas Nasional 1 RKP 2025



1. Memperkokoh ideologi Pancasila dilaksanakan melalui (a) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan; serta (b) aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan berbasiskan ramah pengguna (*user friendly*).
2. **Penguatan demokrasi** dilaksanakan melalui (a) **penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan penguatan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta penguatan kesetaraan masyarakat pada sektor politik**; dan (b) penguatan lembaga demokrasi.
3. **Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik** dilaksanakan melalui (a) **penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik**; serta (b) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S), melalui penguatan kapasitas lembaga dan insan pers yang dibarengi mewujudkan iklim penyehatan media arus utama.
4. Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah; serta (b) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
5. Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia; serta (b) transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.



CATATAN PENUTUP



- **OMS** memiliki **peran strategis** dalam pembangunan dan demokrasi, yaitu sebagai pelaku **pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan kontrol sosial**. Agar OMS dapat melaksanakan perannya secara optimal, maka **penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung** masyarakat sipil menjadi hal yang penting.
- Upaya **menguatkan kebebasan dan kesetaraan** terus dilakukan oleh Pemerintah melalui arah kebijakan dan strategi yang nantinya akan diturunkan pada program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat **berpartisipasi secara lebih aktif dan bermakna** dalam **tiap tahapan pembangunan**.
- Kami berharap **OMS terus konsisten** dalam **melaksanakan perannya, meningkatkan kapasitas organisasi, serta tetap menjalin kerjasama dan berkolaborasi**, baik **antar OMS**, maupun dengan **pemerintah atau swasta**.
- Terkait Indeks Keberlanjutan OMS (CSOSI), harapan kami, agar **pengukuran indeks** tersebut terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap **hasil pengukuran lebih cepat** selesai (misal di triwulan I atau II) sehingga hasil indeks (tahun T) dapat menjadi masukan ataupun mempertajam program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T+2.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Terima Kasih